



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENINGKATAN KASUS TUBERKULOSIS PADA ANAK PASCAPANDEMI

Tri Rini Puji Lestari

Analisis Legislatif Ahli Madya
tri.lestari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan tanggal 24 Maret sebagai hari Tuberkulosis (TB) sedunia. Momentum ini diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global dan sekaligus bersolidaritas memberikan dukungan dalam proses pemulihan penyakit TB.

Indonesia secara global berada di peringkat kedua dunia jumlah kasus TB setelah India. Namun penanganan TB pada anak-anak, belum menjadi prioritas karena dianggap minim risiko penularan. Padahal daya tahan tubuh anak yang rendah menyebabkan anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami TB berat dan kematian dibandingkan orang dewasa. Selain itu anak terinfeksi TB juga dapat mengalami efek samping yang memengaruhi organ selain paru-paru, seperti ginjal, tulang belakang atau otak.

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jumlah kasus TB pada anak-anak tahun 2022 sebanyak 88.927 kasus meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2021 sebanyak 42.187 kasus dan baru 46 persen kasus yang dilaporkan. Artinya, masih ada 54 persen kasus yang *missingcases* yang kemungkinan dikarenakan pasien tidak datang ke fasilitas kesehatan; pasien datang ke fasilitas kesehatan tetapi tidak dicatat; atau memang tidak berobat sama sekali.

Peningkatan jumlah kasus TB pada anak diantaranya karena saat pandemi Covid-19 banyak pasien TB yang tinggal di rumah bersama anak-anaknya dan tidak berobat. Stamina tubuh yang rendah mengakibatkan anak rentan tertular TB dari orang dewasa yang tinggal serumah dengan mereka. Penyebab lain karena saat pandemi anak tidak masuk sekolah dalam jangka waktu lama sehingga sistem imunnya tidak banyak terpapar oleh kuman penyakit. Akibatnya, daya tahan tubuh anak-anak menjadi rendah. Pascapandemi anak-anak sudah masuk sekolah sehingga potensi mereka terpapar oleh kuman penyakit menjadi sangat besar. Anak-anak banyak yang mengalami batuk pilek berkepanjangan dan sulit sembuh. Pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui mereka tertular TB.

Secara umum, penanganan penyakit TB tidak mudah karena dibutuhkan kedisiplinan pasien dalam menjalankan proses pengobatan secara teratur. Jika pasien berhenti berobat sebelum jangka waktu pengobatan itu berakhir, maka memiliki risiko resistensi obat. Kondisi seperti inilah yang banyak terjadi dan memperberat upaya penanggulangan TB di Indonesia. Rendahnya kepatuhan pasien untuk mengkonsumsi obat menyebabkan pengobatan lini pertama tidak lagi berdampak dan bakteri menjadi kebal terhadap obat tertentu, seperti bakteriosid, rimfampisin, dan isoniazid. Penyebab lain yang cukup dominan terkait penyelesaian pengobatan pada pasien TB adalah pendapatan. Pasien TB pada usia produktif bisa saja tidak lagi bekerja karena terkena TB, sedangkan orang tua/keluarga pasien TB yang tidak masuk kerja/menjalankan tugasnya mencari nafkah karena mememani proses pengobatan pada pasien TB akan kehilangan penghasilan. Kondisi ini pada akhirnya akan menyebabkan produktifitas menurun dan menghambat penyelesaian pengobatan pasien TB.

Diperlukan komitmen, keseriusan, dan konsistensi dari pemerintah bersama masyarakat dalam pemberantasan penyakit TB pada anak-anak. Komitmen pemerintah dituangkan dalam rencana aksi nyata penanggulangan TB bersama sektor lain (tidak hanya bidang kesehatan) dan masyarakat. Rencana aksi nyata penanggulangan TB ditujukan pada upaya pencegahan dan pengobatan pasien TB sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran yang salah satunya melalui pemberian vaksinasi BCG pada anak dan meningkatkan keberhasilan kesembuhan.

Atensi DPR

Jumlah kasus penyakit TB pada anak-anak pascapandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Oleh karena itu Komisi IX DPR RI perlu:

1. Mengingatkan kepada pemerintah adanya peningkatan jumlah kasus TB pada anak-anak pascapandemi sehingga perlu adanya strategi nyata penanganan penyakit TB pada anak-anak secara global dan lintas sektor;
2. Memastikan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran penyakit TB pada anak-anak di daerahnya;
3. Melakukan evaluasi terkait capaian cakupan imunisasi untuk menekan dan mengandalkan penyebaran penyakit TB pada anak-anak;
4. Melakukan evaluasi dan memastikan adanya kerjasama dan koordinasi antar sektor terkait dan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan penyakit TB secara umum dan TB pada anak-anak;
5. Memastikan adanya upaya pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan pengobatan penyakit TB.

Sumber

cnnindonesia.com, 28 Maret 2023;
jatengprov.go.id, 28 Maret 2023;
liputan6.com, 21 Maret 2023;
republika.co.id, 27 Maret 2023;
riaupos.jawapos.com, 28 Maret 2023;
voaindonesia.com, 28 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023